

DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH (SAKIP) KABUPATEN
BANGKA

**EVALUASI SAKIP TAHUN 2021** 

## Sistematika Paparan Kepala Perangkat Daerah dalam Evaluasi SAKIP 2021

- 1. Cover
- 2. Keterkaitan antara visi misi Bupati (RPJMD) dengan Renstra PD
- 3. Capaian sasaran strategis PD Tahun 2020

#### Tindak Lanjut LHE SAKIP 2020

- 1. Cascading kinerja (sasaran strategis s.d. sasaran sub kegiatan)
- 2. Rekap efisiensi dan refocusing program, kegiatan tahun 2020
- 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 2021-2023
- 4. Cross cutting pencapaian sasaran PD
- 5. Proses bisnis
- 6. Indikator Kinerja Individu (IKI) mulai ess II, III, IV s.d non eselon dalam satu bidang yang sama, tahun 2020 yang sudah ditandatangani)
- 7. Screenshoot SIPD

### Substansi penilaian baru di tahun 2021 :

- Kolaborasi dan integrasi lintas instansi pemerintah (kementerian, provinsi, kabupaten, desa) (SAKP)
- 2. Refocusing program, kegiatan dan anggaran untuk COVID 19
- 3. Dampak refocusing terhadap kinerja OPD yg terkait kesejahteraan masy
- 4. Prestasi dan penghargaan (jika ada)

## **VISI RPJMD 2019-2023**

BANGKA SETARA . Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia. Kata Sejahtera merefleksikan Pertumbuhan Ekonomi tinggi SETARA dg daerah maju, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah. Kata Mulia merefleksikan harkat dan martabat

#### **VISI BANGKA SETARA, PENCAPAIAN MISI 1**

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi"

#### TUJUAN MISI 1 RPJMD

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi

#### INDIKATOR TUJUAN RPJMD

Indeks Reformasi Birokrasi

#### SASARAN MISI 1 RPJMD

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat

#### INDIKATOR SASARAN RPJMD

Indeks Kepuasan Masyarakat



#### TUJUAN RENSTRA DINPMP2KUKM

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Semua Lapisan Masyarakat

#### INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

IKM Pelayanan Perizinan



SASARAN STRATEGIS RENSTRA DINPMP2KUKM

Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP

#### **VISI RPJMD 2019-2023**

**BANGKA SETARA**. Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia. Kata Sejahtera merefleksikan Pertumbuhan Ekonomi tinggi SETARA dg daerah maju, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah. Kata Mulia merefleksikan harkat dan martabat

#### **VISI BANGKA SETARA, PENCAPAIAN MISI 1**

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi"

#### TUJUAN MISI 1 RPJMD

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

**INDIKATOR TUJUAN** 

**Indeks Reformasi Birokrasi** 

SASARAN MISI 1 RPIMD

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

**INDIKATOR SASARAN RPJMD** 

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten

TUJUAN RENSTRA DINPMP2KUM

MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YG BERKUALITAS, ASPIRATIF DAN APLIKATIF

**INDIKATOR TUJUAN RENSTRA** 

Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Kabupaten

#### SASARAN STRATEGIS RENSTRA DINPMP2KUKM

MENINGKATNYA KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENINGKATNYA PELAKSANAAN PROGRAM PEMB SESUAI PERENC KUALITAS DATA PENDKNG PERENC. PEMB. DRH YG BERBASIS MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMB YG DIMANFAATKAN DLM PERENC PEMB.

#### INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA DINPMP2KUKM

%
KESELARASAN
PERENCANAAN

% CAPAIAN
KINERJA
DAERAH YANG
SESUAI TARGET
RPJMD

% DATA
PENDUKUNG
PERENC.
PEMB. DRH YG
DIMANFAATKAN

% HASIL
PENELITIAN DAN
PENGEMB YG
DIMANFAATKAN
DLM PERENC

#### **VISI RPJMD 2019-2023**

**BANGKA SETARA** . Kata Setara adalah akronim dari Sejahtera dan Mulia. Kata Sejahtera merefleksikan Pertumbuhan Ekonomi tinggi SETARA dengan daerah maju, Meratanya Tingkat Pendapatan Masyarakat, Keterbebasan dari Kemiskinan, SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Terciptanya Pemerataan Pembangunan antar Wilayah. Kata Mulia merefleksikan harkat dan martabat

#### VISI BANGKA SETARA, PENCAPAIAN MISI 5

"Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"

#### **TUJUAN MISI 5 RPJMD**

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

#### INDIKATOR TUJUAN

INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

#### SASARAN MISI 5 RPJMD

MENINGKATNYA PRODUKSI BARANG DAN JASA

#### **INDIKATOR SASARAN MISI 5 RPJMD**

**Indeks PDRB** 

#### TUJUAN RENSTRA DINPMP2KUKM



Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan UMKM

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

#### **INDIKATOR TUJUAN RENSTRA**

Persentase Peningkatan Klasifikasi Koperasi dan UMKM Berkualitas

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah



#### SASARAN STRATEGIS RENSTRA DINPMP2KUKM

Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing Meningkatnya Investasi Daerah

#### INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Persentase Koperasi Yang Sehat Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Persentase Realisasi Investasi Daerah

## Capaian Sasaran DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA ( OUTCOME)	TARGET KINERJA TH 2020	REALISASI KINERJA TH 2020
Persentase Peningkatan Investasi Daerah	34,00%	35,00%
Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	ВВ	ВВ
Persentase Peningkatan Klasifikasi Koperasi Berkualitas	87,00%	88,00%
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah	BAIK	BAIK
Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah	6,00%	7,00%
Akuntabilitas Pelayanan Perizinan	BAIK	BAIK

#### Dari 6 (Enam) sasaran:

- 3 (Tiga) sasaran sudah mendapat sesuai target yang ditetapkan,
- 3 (Tiga) sasaran memiliki kinerja diatas target yang ditetapkan,



# TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2020

#### 2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP 2020

#### Rekomendasi

Menyempurnakan rumusan Tujuan, Sasaran strategis serta IKU setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil, dan memiliki indikator yg relevan & terukur, sehingga ada keselarasan penjabaran kinerja level Kab, OPD sampai individu Tindak Lanjut

Menyusun Perubahan Renstra OPD dengan memperbaiki Tujuan, Sasaran Strategis serta IKU OPD (ditetapkan dengan Perbup No. 8 Th 2021)

Menyusun & menyempurnakan proses bisnis yg mengacu pada kinerja di tiap entitas dan menggunakan hasilnya sebagai ukuran kinerja bagi tiap individu

- Mengirimkan pejabat untuk mengikuti bimtek penyusunan Proses Bisnis Perangkat Daerah dengan narasumber dari Kemenpan RB
- Menyusun perbaikan proses bisnis level OPD (ditetapkan dgn Keputusan Kepala Dinas)

Menyempurnakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja dalam rangka peningkatan kualitas penerapan tata Kelola Pemkab Bangka

Menerapkan penggunaan aplikasi SIPD yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan

#### Dokumentasi Dukung

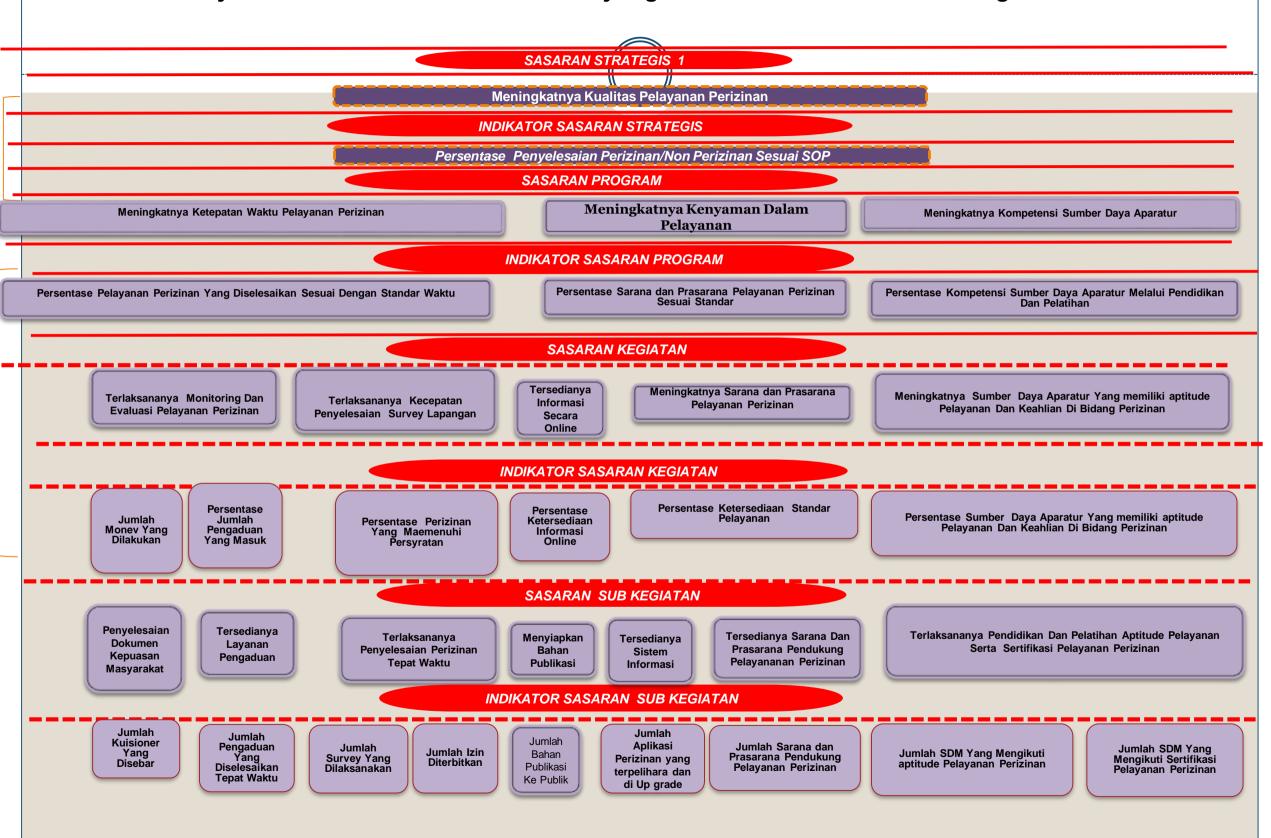




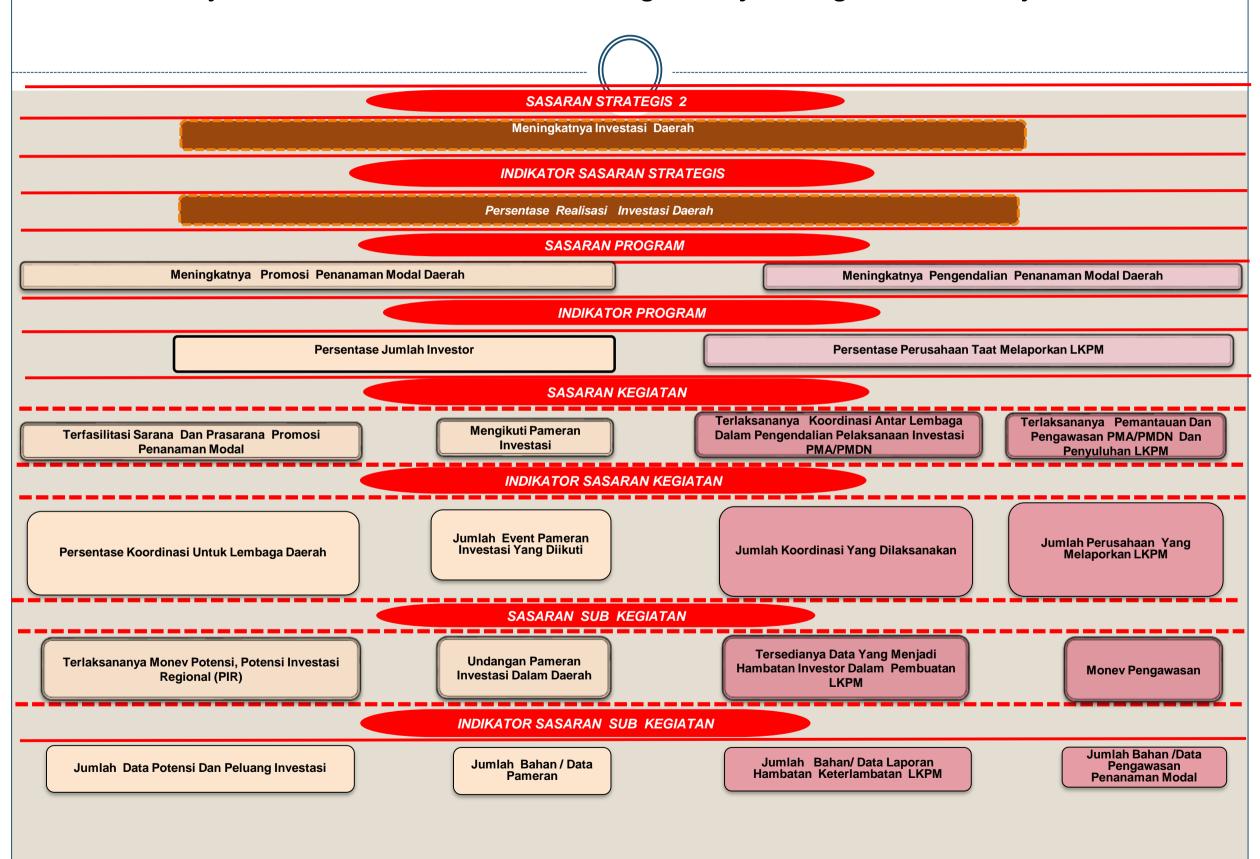




## PENCAPAIAN MISI 1 RPJMD PADA RENSTRA DINPMP2KUKM 2019-2023 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi"



## <u>PENCAPAIAN MISI 1 RPJMD PADA RENSTRA DINPMP2KUKM 2019-2023</u> "Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"



#### SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Persentase Koperasi Yang Sehat SASARAN PROGRAM Meningkatnya Koperasi Yang Berklasifikasi A Meningkatnya Omset Usaha Mikro INDIKATOR SASARAN PROGRAM Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berklasifikasi A Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro SASARAN KEGIATAN Terlaksananya Pembinaan Koperasi Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro INDIKATOR SASARAN KEGIATAN Persentase Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro Persentase Pembinaan Koperasi SASARAN SUB KEGIATAN Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya RAT **Promosi** Fasilitasi Usaha Mikro Terlaksananya Diklat Pendampingan Diklat Usaha Money Usaha **Money Koperasi Produk Usaha Tahunan Dengan Lembaga Koperasi** Usaha Mikro Mikro Mikro Mikro Keuangan INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT Jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Jumlah Pengurus Koperasi Yang Memiliki Kompetensi Jumlah Pelaku Usaha Mikro Yang Memiliki Kompetensi Jumlah Fasilitasi Usaha Mikro **Jumlah Money** Jumlah Monev Usaha Mikro Jumlah Koperasi Pendampingan Usaha Mikro

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Tata Laksana Perangkat Daerah Dan Pelaporan Kinerja perangkat daerah INDIKATOR SASARAN PROGRAM Nilai Aspek Persentase Temuan Indeks Profesionalisme Perangkat Daerah Jumlah Aspek (Rasio Ketersediaan Perencanaan Kinerja Pelaporan Kinerja Pengelolaan Keuangan OPD ASN (Dihitung dari Aspek Layanan Perangkat Sarana Prasarana Dalam AKIP Dalam AKIP dlm LHP-BPK RI TataLlaksana Dalam Daerah Yang Aparatur) rangkat Dae Perangkat Daeral PMRB) Menggunakan Teknologi Informasi SASARAN KEGIATAN \_\_\_\_\_\_ -----Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Pengelolaan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Penggunaaan Teknologi Pelaksanaan Arsip Perangkat pelaksanaan Pemenuhan Sarana Dan Kinerja Aparatur penyusunan **Aparatur** Informasi Dalam Penyusulan Pelaporan Daerah yang Prasarana Pendukung Pelaporan Aset perencanaan kinerja Perangkat Daerah Perangkat penyelenggaraan Layanan Aparatur Pelaporan Kinerja Keuangan Sesua dilekola sesuai Sesuai Standar sesuai standar Sesuai Sandar Standar peraturan -standar--INDIKATOR SASARAN KEGIATAN Persentase -----Arsip Jumlah aspek Persentase layanan perangkat Pelaporan Persentase Perangkat Persentase Yang Memperoleh Perencanaan Aparatur Yang daerah yang Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja Keuangan Yang Pelaporan Aset Daerah yang Aparatur Yang Kinerja Yang Yang Disusun Disusun Sesuai yang disusun menggunakan dilekola Bekerja Tepat waktu Pendukung Kinerja teknologi informasi Sesuai Standar Standar sesuai standar sesuai peraturan SASARAN SUB KEGIATAN Terlaksan anya Terlaksananya Terlaksananya Penvusunan Terlaksananya Terlaksananya Pengelola Terlaksananya Terlaksananya Penyusunan Terlaksananya Pengembangan Penyusunan operasionalisasi Penyusunan Laporan Penyediaan Sarana Monitoring Dan Monitoring Dan Dokumen Operasionalisa LaporanAset Kompetensi Dokumen lavanan Keuangan Dan Prasarana Administr Evaluasi Kineria Evaluasi Disiplin Pelaporan si ayanan teknologi Bagi Aparatur Perencanaan Sesuai Sesuai Pendukung Kinerja **Aparatur** Aparatur asi Kinerja Teknologi Standar informasi Standar Kinerja Persurata Informasi \_\_\_\_\_\_ Perangkat INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN Daerah Jumlah Jumlah Aparatur Jumlah Aparatur Jumlah Jumlah Perlengkapa n Gedung Jumlah Aparatur Jumlah Lavanan Yang Dimonev Jumlah dokumen Yang Mengikuti Perencanaan Laporan Laporan Aset Gedung layanan layanan Penyediaan Yang Dimonev pelaporan kinerja Pengembangan Tingkat Kinerja Yang Keuangan Yang Disusun Administrasi Makan Dan Kantor Kantor Yang Kinerjanya penyediaan yang disusun Kedisiplinannya Yang Disusun Minum Rapat Yang Persuratan Internet Yang Yang Tertangani

### **EFISIENSI RENSTRA**

	Sebelum Review Renstra 2019-2023	Setelah Review Renstra 2019-2023 (Perpres 90)	Efesier 3	<b>nsi</b> %
∑ Tujuan	7	3	4	42,85%
∑ Indikator Tujuan	7	3	4	42,85%
∑ Sasaran	6	3	3	50 %
∑ Indikator Sasaran	7	3	4	42,85%
∑ Program	11	11	0	0 %
Σ Kegiatan	35	13	22	37,14 %
∑ aNGGARAN	8.545.150.000,-	4.110.495.000,-	4.434.655.000,-	51,61 %

## 5 Indikator Kinerja Utama DINPMP2KUKM(IKU)



-		Kondisi				Kondisi
		Awal	2021	2022	2023	Akhir
SAKIP ETENCENAL DESCRIPTION	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	ВВ	ВВ	ВВ	А	Α
	Persentase Realisasi Investasi Daerah	34,00	35,00	36,00	37,00	37,00
	Persentase Penyelesaian Perizinan /Non Perizinan Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Koperasi Sehat	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	8,00	12,00	17,00	20,00	20,00

#### **Crosscutting Sasaran 1**

Meningkatnya

Kemudahan

Lavanan

Perizinan

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan
SecaraTerpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal Yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan SEKRETARIAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur

- 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan
- 3. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Meningkatnya Kenyaman Dalam Pelayanan

**SEKRETARIAT** 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

**Kegiatan Administrasi Umum** 

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

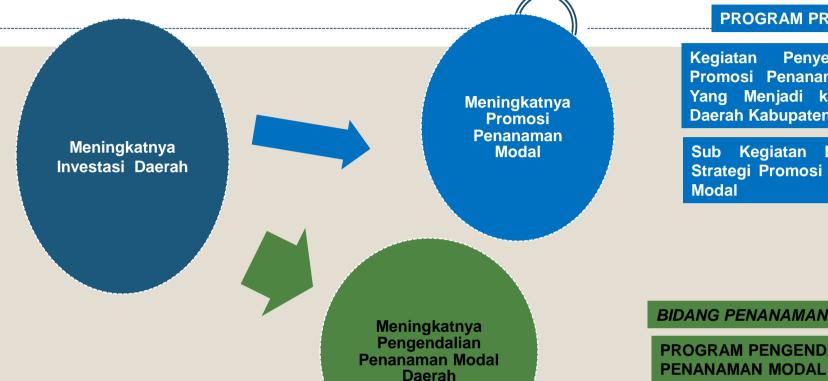
BIDANG DATA DAN SISTEM INFORMASI

Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian Dan pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik

#### **Cross Cutting Sasaran 2**



#### **BIDANG PENANAMAN MODAL**

#### PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman

> Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan **Promosi Penanaman Modal Daerah**

#### **BIDANG PENANAMAN MODAL**

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Dan **Penannaman Modal** 

#### **Cross Cutting Sasaran 3**

#### **BIDANG KOPERASI DAN UMKM**

#### PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota

#### PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kaupaten/Kota

Pengetahuan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi

Meningkatnya

Koperasi yang Berklasifikasi A

> Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro

#### **BIDANG KOPERASI DAN UMKM**

#### PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam DaerahKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

#### **BIDANG KOPERASI DAN UMKM**

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL. **DAN USAHA MIKRO** 

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro

Sub KegiatanPemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

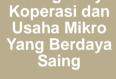
#### **BIDANG KOPERASI DAN UMKM**

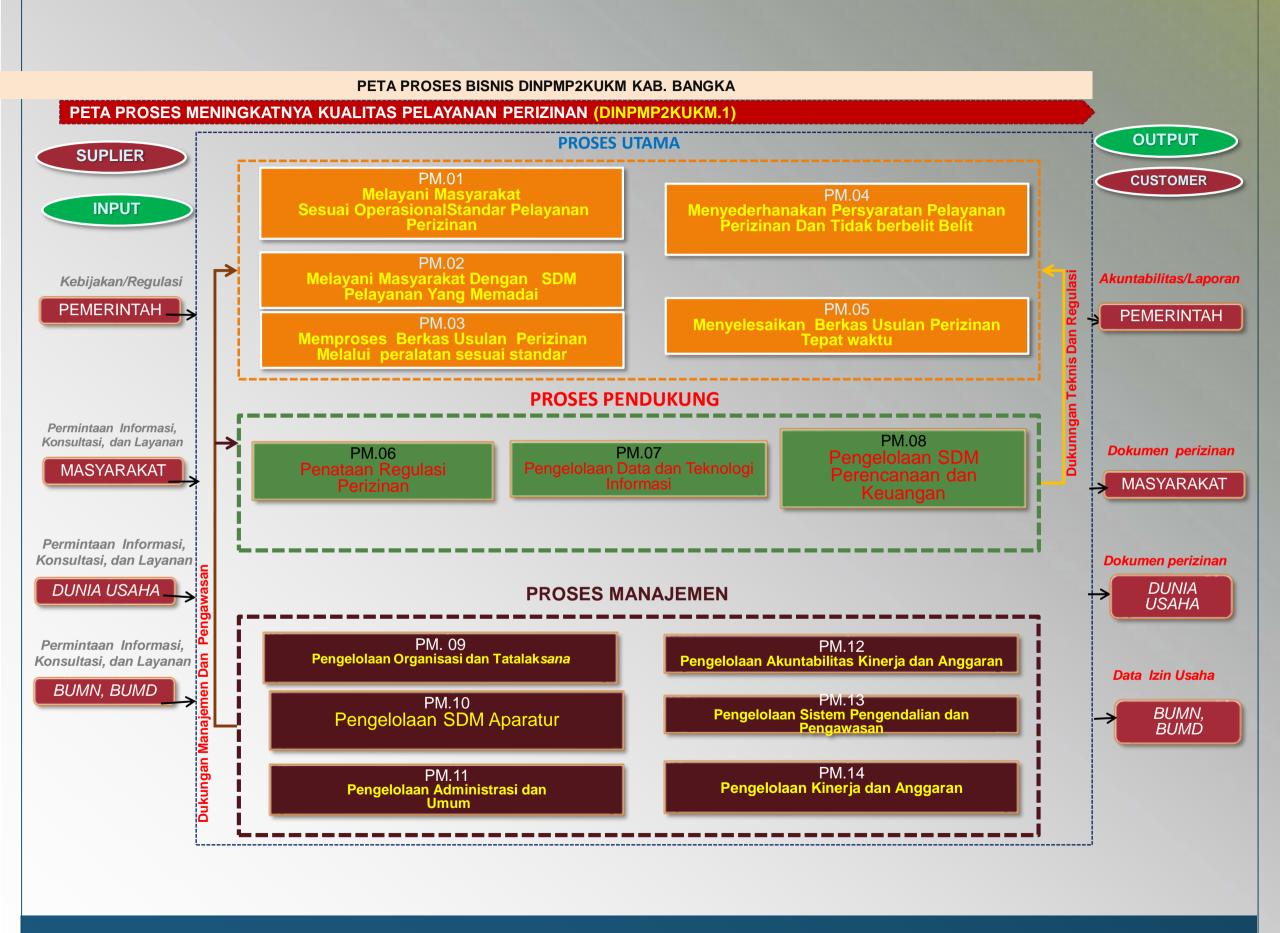
#### PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

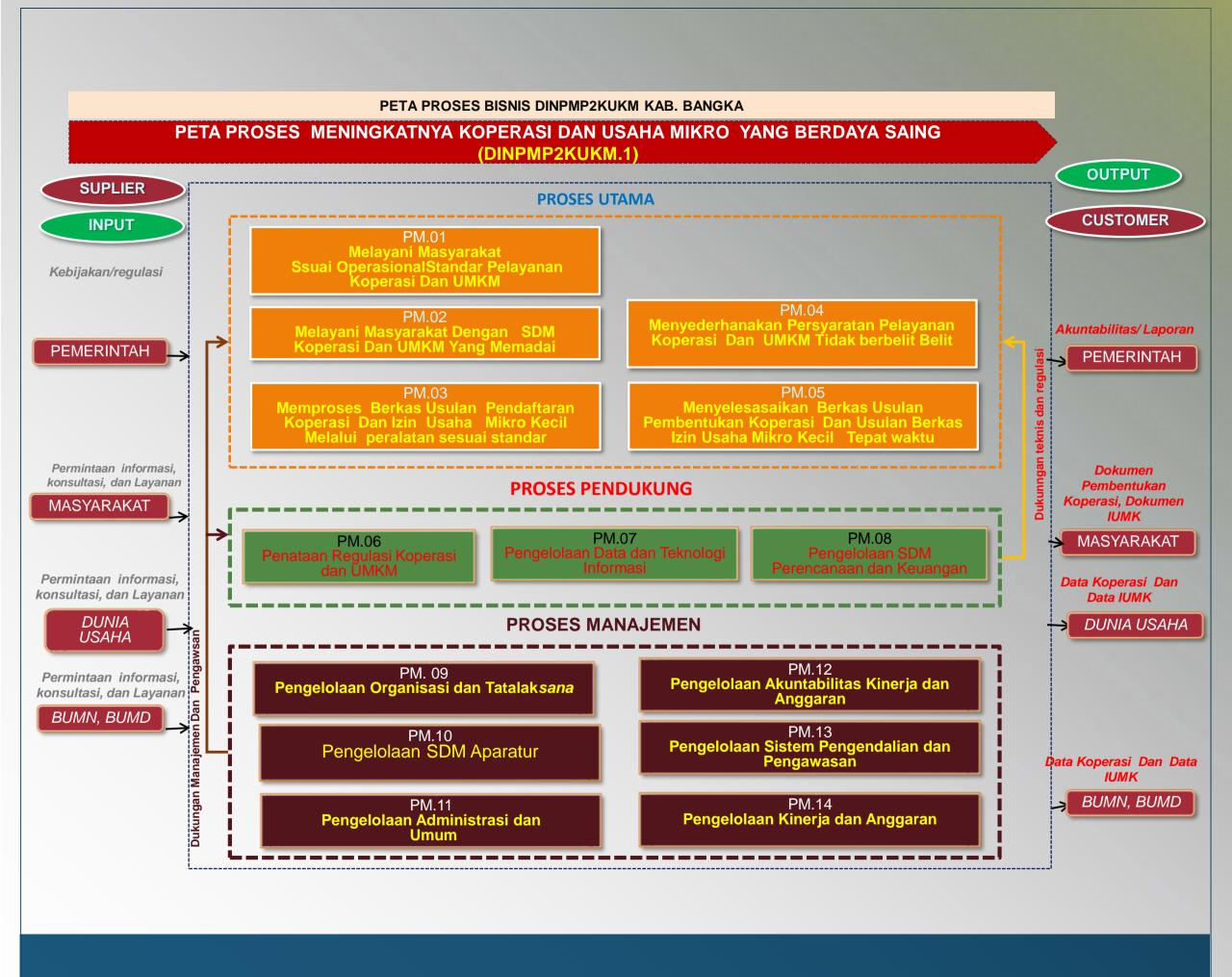
Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

Meningkatnya **Omset Usaha** Mikro

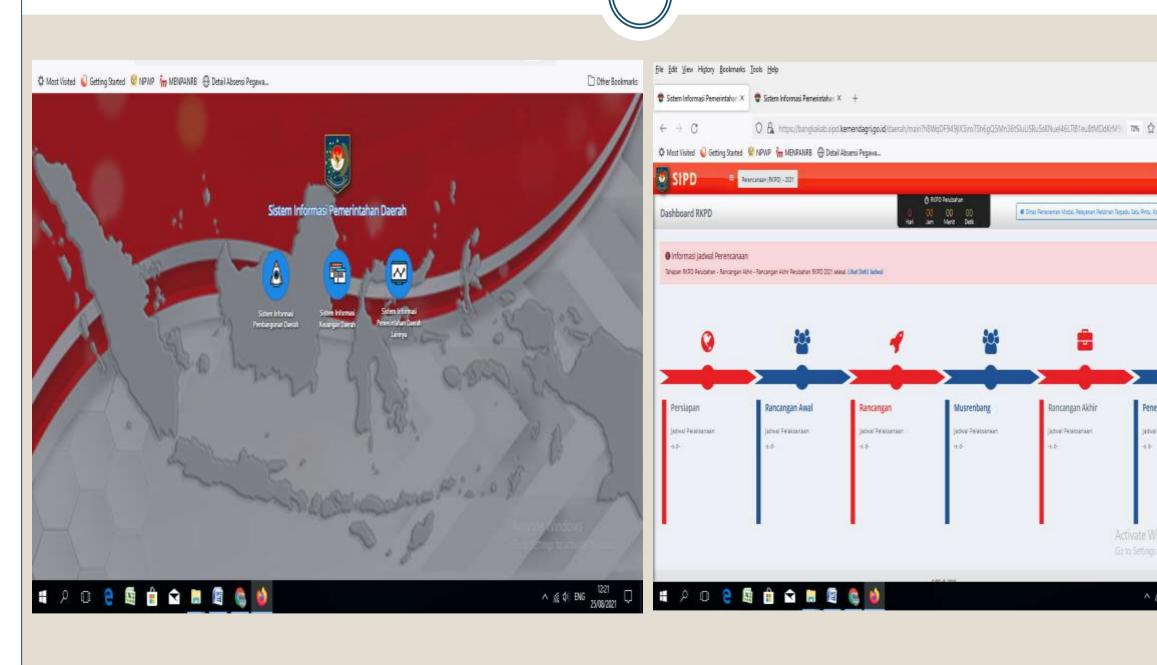




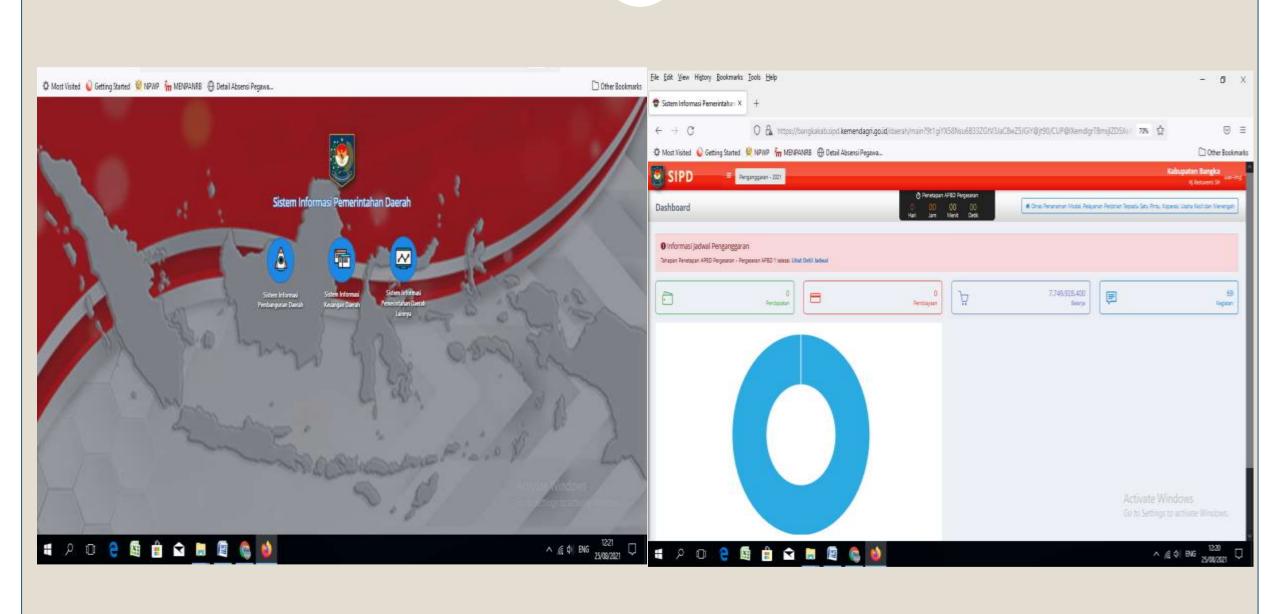
#### PETA PROSES BISNIS DINPMP2KUKM KAB. BANGKA PETA PROSES MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH (DINPMP2KUKM.1) OUTPUT **PROSES UTAMA SUPLIER** PM.01 **CUSTOMER Melayani Investor INPUT** Ssuai OperasionalStandar Pelayanan Investasi PM.02 PM.04 Kebijakan/Regulasi Melayani Investor Dengan SDM Pelayanan Investasi Yang Memadai Akuntabilitas/Laporan Memberikan Kemudahan Investasi melalui Insentip Daerah **PEMERINTAH PEMERINTAH** PM.03 Menerima Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Mencatat Dan Memproses Laporan Untuk Tujuan Evaluasi Realisasi Investasi Daerah PM.05 Memberikan Informasi Peluang Investasi kepada Dunia usaha dan Regulasi Permintaan Informasi, Konsultasi, dan Layanan **PROSES PENDUKUNG Dokumen Profil** Investasi MASYARAKAT MASYARAKAT PM.08 **Dukunnga Teknis** PM.06 PM.07 Pengelolaan SDM Perencanaan dan Keuangan Penataan Regulasi **Dokumen LKPM/** Dokumen Realisasi Menyampaikan LKPM Investasi **DUNIA** DUNIA USAHA **PROSES MANAJEMEN USAHA** PM.12 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan PM. 09 Pengelolaan Organisasi dan Tatalak*sana* Permintaan Informasi, Konsultasi, dan layanan Anggaran **Dokumen LKPM/ DokumenRealisasi** BUMN, Investasi Dan PM.13 PM.10 Pengelolaan SDM Aparatur Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan BUMĎ **Dokumen Profil** Investasi BUMN. PM.14 BUMD Pengelolaan Kinerja dan Anggaran PM.11 Pengelolaan Administrasi dan Umum



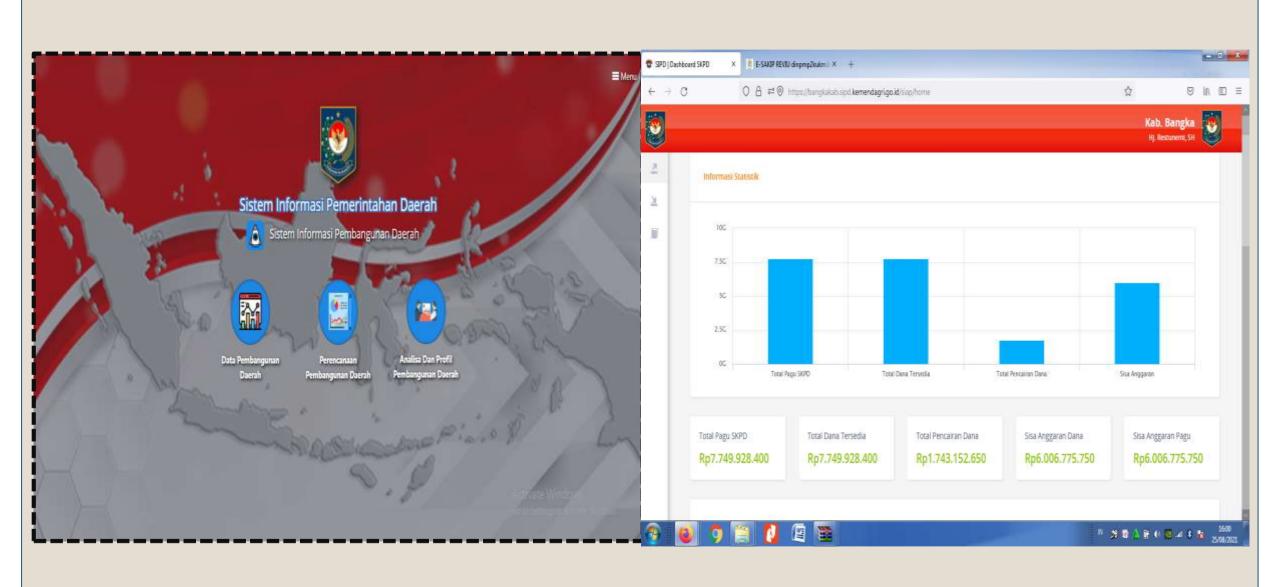
## SIPD PERENCANAAN



## SIPD PENGANGGARAN



## SIPD PENATAUSAHAAN



DI SELURUH

INDONESIA

PADA TINGKAT

KABUPATEN

APLIKASI ONLINE DATA SYSTEM (ODS) MERIUPAKAN APLIKASI YANG DIGUNAKAN MELAKUKAN PENERTIBAN DATA KOPERASI DAN UMIKM DISELURUH INDONESIA. DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI ADMIN APLIKASI ODS
MENGOORDINIR ADMIN YANG TELAH
DITENTUKAN PADA DINAS YANG
MEMBIDANGI KOPERASI DAN UMKM

DI SELURUH

INDONESIA

PADA TINGKAT

PROPINSI

DATA MASUK
DALAM SISTEM
APLIKASI ONLINE
DATA SYSTEM
DAN TERBACA
OLEH
KEMENTERIAN
KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK
INDONESIA

TERTIB

IDATA

IKOPERASI

IDAN UIMIKM

IDISELUIRUIH

INIDONESIA

TERPUISAT

IDAILAM

APLIIKASI

ONLINE

IDATA

SYSTEM

(OIDS)

DINAS YANG
MEMBIDANGI
KOPERASI DAN
UMKM DI SELURUH
INDONESIA PADA
TINGKAT PROPINSI
DAN KABUPATEN
MENDATA
KOPERASI DAN
UMKM YANG
BERADA PADA
WILAYAH
KEWENANGAN
MASING-MASING

DATA DIINPUT
DALAM
APLIKASI
ONLINE DATA
SYSTEM
KOPERASI
DAN UMKM

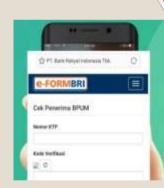






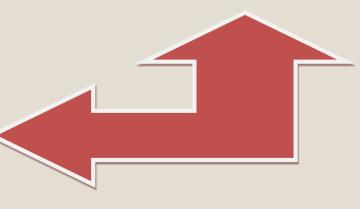
















APLIKASI **PELAYANAN** PERIZINAN ONLINE (OSS-RBA) ADALAH **PERIZINAN** BERUSAHA **DITERBITKAN OLEH** LEMBAGA OSS **UNTUK DAN ATAS** NAMA MENTRI. GUBERNUR, **BUPATI/WALIKOTA KEPADA PELAKU USAHA MELALUI** SISTEM **ELEKTRONIK YANG** TERINTEGRASI GUNA **MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT PROSES PERIZINAN** BERUSAHA



KEMENTRIAN INVESTASI/BKPM RI
MELALUI LEMBAGA OSS SEBAGAI
ADMIN APLIKASI OSS MEMBERIKAN
AKUN HAK AKSES TURUNAN
KEPADA DINAS/INSTANSI YANG
MEMBIDANGI PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



DATA PEMOHON YANG MASUK
DALAM SISTEM APLIKASI OSS RBA
DAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN,
MAKA DITERBITKAN PERIZINANNYA
OLEH LEMBAGA OSS ATAS NAMA
MENTRI, GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA

DISELURUH INDONESIA PADA TINGKAT PROVINSI DISELURUH INDONESIA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

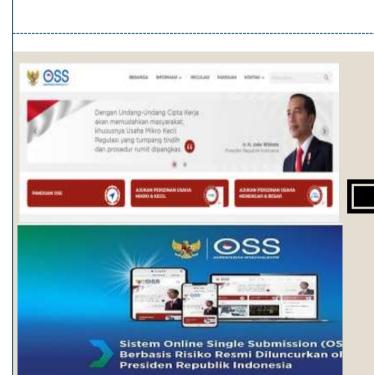




DINAS YANG MEMBIDANGI PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA
TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MEMPROSES DAN MEMVERIFIKASI
PERMOHONAN PERIZINAN YANG MENJADI
KEWENANGAN MASING-MASING



DATA DI INPUT OLEH PEMOHON MELALUI APLIKASI ONLINE OSS-RBA



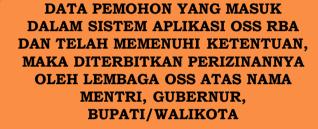




**DISELURUH INDONESIA PADA TINGKAT PROVINSI** 



**DISELURUH INDONESIA** PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA



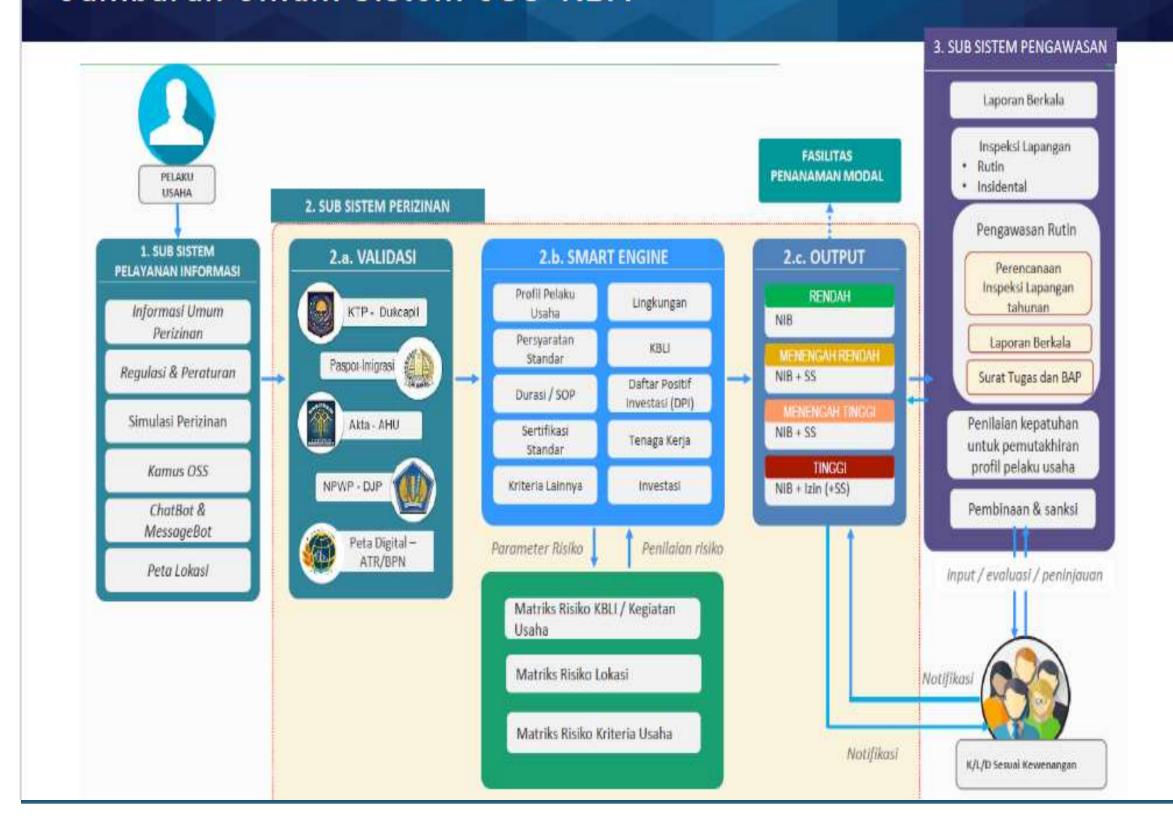


DATA DI INPUT OLEH PEMOHON MELALUI **APLIKASI ONLINE OSS-RBA** 

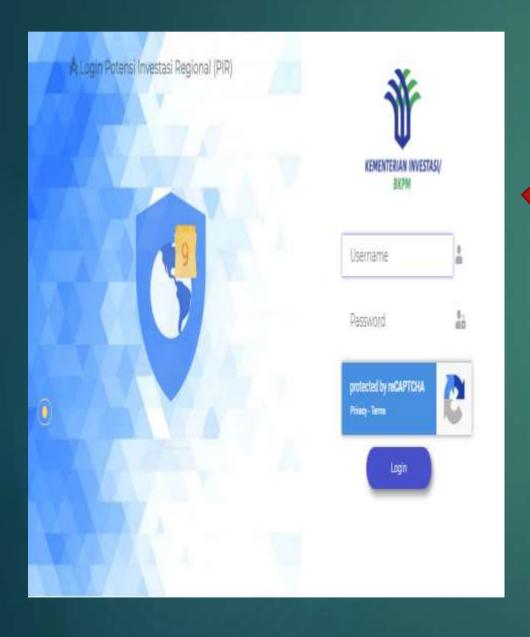




## Gambaran Umum Sistem OSS-RBA











PROFIL

INFRASTRUKTU R







PELUANG DAERAH

INSENTIF DAERAH







PELUANG PROYEK

## Efisiensi dan Refocusing Anggaran Tahun 2020

1	NO	PROGRAM	ANGGARAN AWAL (Rp)	SETELAH REFOCUSING (Rp)
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	981.340.000	813.584.906
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.100.000	38.300.000
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.800.000	-
	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.450.000	6.825.000
	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	15.000.000	10.160.000
	6	Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	9.500.000	-
	7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	37.600.000	37.600.000
	8	Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	_	-
	9	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	33.981.000	6.260.000
	10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	270.945.000	215.110.000
	11	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	13.350.000	13.350.000
		JUMLAH	1.454.066.000	1.141.189.906

## DAMPAK REFOCUSING TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA YANG TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	KETERSEDIAAN HANDSANITIZER DAN MASKER	DENGAN TERSEDIANYA HANDSANITIZER DAN MASKER PELAYANAN PERIZINAN DINPMP2KUKM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 KEPADA MASYARAKAT TIDAK TERHAMBAT DAN BERJALAN LANCAR SESUAI PROTOKOL KESEHATAN

## PRESTASI DAN PENGHARGAAN

PIAGAM PENGHARGAAN DALAM PENDATAAN PERUMAHAN TERPADU DAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI "BAIK DENGAN CATATAN"



## PRESTASI DAN PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN HASIL EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DAN KOMITMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS







# Terma Kasih